

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur perlu dilaksanakan pembangunan yang merata di semua bidang terutama pada sektor perekonomian yang saat ini selalu jadi perhatian pemerintah. Karena masalah perekonomian merupakan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah berupaya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya baik itu dalam sektor ekonomi makro maupun mikro. Salah satu kebijakan dalam ekonomi makro yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang baik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha serta dapat meningkatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada baik itu manusia, alam dan keahlian yang dimiliki serta teknologi yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan perusahaan. Bagi perusahaan yang mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya di dunia usaha, kemajuan tersebut dapat memberikan motivasi tersendiri supaya perusahaan tersebut tetap “*survive*” dan terus berkembang. Semakin berkembang perusahaan maka akan semakin bertambah pula pekerjaan-pekerjaan yang di hadapi dan harus di tangani

secara tepat, cepat dan seksama, sehingga semakin sulit pula bagi perusahaan melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung dan keseluruhan, oleh karena itu diperlukan pendelegasian wewenang dari pimpinan perusahaan kepada bawahan guna meringankan beban pimpinan perusahaan, sementara pimpinan perusahaan dapat lebih memfokuskan perhatiannya lebih banyak dalam hal perencanaan dan jalannya perusahaan. Namun bagaimanapun juga tanggung jawab jalannya perusahaan tetap berada pada pimpinan perusahaan sesuai dengan struktur keorganisasian yang telah dibentuk dalam perusahaan. Jika tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada masing-masing personil dalam struktur organisasi tidak dijalankan dengan baik dan sempurna, maka akan mudah terjadinya penyelewengan–penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, apabila aktivitas keorganisasian tersebut berjalan dengan baik dan sempurna kemungkinan besar penyelewengan dalam perusahaan dapat dihindarkan.

Untuk mengatasi masalah yang berkenaan dengan pengawasan tersebut diperlukan suatu alat bantu bagi manajemen perusahaan yakni berupa Struktur Pengendalian Intern. Struktur Pengendalian Intern yang baik dalam perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menjaga harta milik perusahaan dan menemukan kesalahan-kesalahan dalam pencatatan data akuntansi yang merugikan perusahaan. Meskipun demikian, bukanlah Struktur Pengendalian Intern yang dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan, melainkan struktur pengendalian intern yang baik dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan.

Dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah prinsip kehati-hatian sangat diutamakan sehingga pengawasan terhadap kinerja perusahaan sangat dibutuhkan. Salah satu cara agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu dengan adanya Struktur Pengendalian Intern yang baik yang didalamnya berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas Bank Syariah pada umumnya berkenaan dengan aktivitas penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan pemberian jasa (*service*).

Salah satu skim fiqh yang paling populer di bank syariah dalam kegiatan menyalurkan dana adalah skim jual beli *murabahah*.<sup>1</sup> Transaksi inipun lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun sebagai sebuah produk penyaluran dana yang berasal dari menghimpun dana dari masyarakat dalam kinerjanya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam pelaksanaannya penyaluran dana *murabahah* harus mencapai prosentase rencana anggaran yang ditetapkan. Untuk itu Struktur Pengendalian Intern diperlukan agar bank pihak bank dalam menjalankan operasinya tetap terkendali

Adapun maksud dari Struktur Pengendalian Intern dalam rangka pengamanan pembiayaan *murabahah* ialah sebagai alat bantu pimpinan perusahaan dalam mengamankan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan *murabahah* itu sendiri.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank sebagai salah satu produk penyaluran dana masih menemui kendala pemenuhan tingkat pengembalian dana

---

<sup>1</sup> Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi Ke-2: PT. Raja Grafindo Persada hlm.34

yang disalurkan tersebut kepada nasabah, karena bank masih dihadapkan pada pembiayaan bermasalah. Meskipun bank masih dapat menutupnya dengan cadangan pembiayaan atau cadangan piutang ragu-ragu. Oleh sebab itu, apakah struktur pengendalian intern di Bank Syariah Mandiri telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan atau ketentuan bank sehingga kemungkinan terjadi *non performing loan* (NPL) dapat diatasi? Dan apakah faktor penyebab masih terjadinya pembiayaan bermasalah? Berangkat dari hal tersebut, analisis terhadap struktur pengendalian intern dalam pembiayaan murabahah menjadi dasar pelaksanaan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kuningan.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai akuntansi perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas masalah penelitian ini dapat diidentifikasi yaitu

1. Struktur Pengendalian Intern Meliputi
  - a. Lingkungan pengendalian
  - b. Penetapan risiko manajemen
  - c. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
2. Pengamanan Pembiayaan Murabahah Griya BSM Meliputi
  - a. Tingkat kolektibilitas pembiayaan murabahah Griya BSM
  - b. Pencapaian target penyaluran dana pembiayaan murabahah Griya BSM

### **2. Perumusan Masalah**

Secara konseptual penelitian ini akan menelaah sejauhmana peranan Struktur Pengendalian Intern dalam pengamanan pembiayaan murabahah.

- a. Apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
- b. Bagaimana penerapan struktur pengendalian intern pada pembiayaan murabahah konsumtif griya BSM?

### **C. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Mengingat peranan struktur pengendalian intern sangat penting dalam usaha meningkatkan pengawasan jalannya aktivitas perusahaan secara umum dan pengawasan dana secara khusus, maka dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebisa mungkin terhindar dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap produk tersebut khususnya secara intern. Maka efektifitas struktur pengendalian intern inilah yang menjadi alasan mengapa perlu dilaksanakan penelitian.

Sesuai dengan masalah yang penulis idenifikasikan di atas maksud dari penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui kontribusi Struktur Pengendalian Intern terhadap Pembiayaan Murabahah Griya BSM pada Bank Syariah Mandiri Kuningan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern dalam Pengamanan Pembiayaan Murabahah yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri Kuningan

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1) Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam spesifikasi akuntansi, khususnya etika perusahaan dan etika bisnis sebagai bagian dari manajemen yang harus berdasarkan pada Syariat Islam.

### 3) Kegunaan Akademik

Penelitian ini selain diharapkan seperti dua hal diatas, juga sebagai perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon, Program Studi Ekonomi Perbankan Islam pada khususnya sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan pada Bank Syari'ah Mandiri Kuningan bagi penulis sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan sampai sejauh mana ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah guna membandingkan antara teori-teori yang ada dengan pelaksanaannya.
2. Memberikan informasi secara luas tentang manfaat struktur pengendalian intern dalam rangka menjamin tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan

Berbagai temuan yang berhasil diangkat dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga yang memiliki kepentingan dalam masalah yang diteliti, dan bagi pihak Bank Syariah Mandiri Kuningan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha yang dilaksanakan.

## E. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang kepercayaan penuh dari para nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito. Oleh karena itu, Bank harus bisa menciptakan hubungan yang kondusif dengan nasabahnya dan dapat menjalankan operasinal secara profesional.

Setiap perusahaan yang beorientasi pada laba (*profit oriented*) kas menjadi prioritas utama. Untuk itu pimpinan perusahaan di tuntutan membuat peramalan arus kas (*cash flow*) yang baik dan proporsional. Untuk mengimplementasikan ramalan tersebut perusahaan perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan memenuhi target yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pimpinan perusahaan tidak mungkin seorang manajer bekerja secara sendiri meskipun secara keseluruhan tanggung jawab berada padanya karena telah diakui bahwa pimpinan perusahaan merupakan suatu lembaga (*agency*) yang paling penting dalam mengemudikan kegiatan perekonomian kita.<sup>16</sup>

Untuk membantu tugas seorang pimpinan dan demi efektifitas manajemen diperlukan sebuah struktur pengendalian untuk menjamin efisiensi bisnis karena tidak mungkin bisnis akan berjalan secara efektif tanpa adanya pengendalian.<sup>17</sup> Salah satu bukti bahwa pimpinan perusahaan tidak dapat mengimplementasikan kebijakan perusahaan dengan seksama yang telah diembankan kepadanya ialah adanya pendelegasian tugas yaitu

---

<sup>16</sup> J.B Heckert, *Controllershship*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.4

<sup>17</sup> Hermanson, et.al. *Accounting Principles*, (Texas: Business Publication, 1997), hlm.269

Memberikan amanat berupa tugas tertentu kepada salah satu staf bahkan wewenang untuk mengambil keputusan jika diperlukan atau agar ia menjalankan tugas atasan atau pemberian sebagian tanggung jawab dan wewenangnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan efisien.<sup>18</sup>

Kebijakan yang telah disusun dan metode yang akan dijalankan ini merupakan bagian dari pengendalian. Adapun struktur pengendalian intern yaitu

Semua rencana, metode, dan kebijaksanaan yang terkoordinir dalam perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketetapan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat di percaya, menggalakan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah di gariskan<sup>19</sup>.

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai perencanaan dari organisasi dan semua prosedur-prosedur serta tindakan untuk mewujudkan:

1. Mengamankan harta perusahaan.
2. Ketaatan kepada kebijakan yang telah di gariskan oleh pimpinan perusahaan
3. Meningkatkan efisiensi perusahaan
4. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan.<sup>20</sup>

Atau pengendalian intern adalah suatu rencana organisasional dan semua tindakan yang dilakukan perusahaan untuk:

1. Mengamankan harta
2. Mendorong diikutinya kebijakan perusahaan
3. Mendorong efisiensi operasional
4. Menjamin ketepatan dan dapat dipercayainya catatan-catatan akuntansi.<sup>21</sup>

Namun, Struktur Pengendalian Intern tidak dapat dikatakan sangat efektif meskipun di sertai kehati-hatian dalam rancangan dan implementasinya karena

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Jawad, *Menjadi Manaje Sukses*, (Jakarta:Gema Insani,2004),Hlm.227

<sup>19</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Norma Pemeriksaan Akuntan*, (Jakarta:Rineka Cipta,1990),Hlm.29

<sup>20</sup> Hermanson, *Et. Al. Loc Cit*

<sup>21</sup> Herngren. Charles T. dkk, *Akuntansi*. (Jakarta:salemba Empat,1997),hlm.342

efektifitasnya tergantung kepada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya.<sup>22</sup>

Struktur pengendalian intern (internal control structure) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang bagi manajemen dengan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang diyakini penting akan tercapai.<sup>23</sup>

Struktur pengendalian intern sangat penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal. Struktur pengendalian intern yang baik dan memberikan jaminan aman atas aktiva dan catatan akan mempermudah audit secara efektif.<sup>24</sup>

Akan sangat tidak ekonomis bagi para auditor untuk memeriksa seluruh transaksi dalam suatu periode, sehingga mereka harus bergantung pada sistem akuntansi untuk menghasilkan catatan yang akurat. Untuk menguji tingkat kepercayaan dari sistem akuntansi perusahaan, para auditor akan mengevaluasi sistem pengendalian internalnya. Para auditor akan menemukan kelemahan dalam sistem tersebut dan menyarankan perbaikan. Para auditor akan memberikan objektivitas di dalam laporannya. Sedangkan para manajer yang berkecimpung dalam operasi perusahaan mungkin tidak akan melihat kelemahan ini. Seorang auditor dapat menemukan bahwa seorang pegawai yang menangani kas juga menangani tugas akuntansi. Auditor juga dapat mengetahui bahwa kekurangan kas terjadi karena kurangnya usaha menagih piutang, rekomendasi auditor akan sangat membantu perusahaan menjalankan usahanya dengan lancar dan ekonomis.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Arrens Dan Loebbecke, *Auditing*. jilid ke-1, (Jakarta: Salemba Empat, 1996), Hlm. 260

<sup>23</sup> Arrens Dan Loebbecke, *Auditing*. jilid ke-2, (Jakarta: Salemba Empat, 1997)

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>24</sup> Horngren, T. Charles, dkk., *Akuntansi*, jilid ke-1, (Jakarta: Salemba Empat, 1997), hlm. 346-347

<sup>25</sup> *Ibid*

Bagi sebuah perusahaan ,struktur pengendalian intern merupakan sarana efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan kata lain struktur pengendalian intern memberikan kepastian bahwa penggelpan laporan keuangan dapat di cegah atau di deteksi lebih dini khususnya dalam bidang finansial perusahaan berupa arus kas yaitu *arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas*<sup>26</sup>. kas sendiri di deinisikan *uang yang dimiliki perusahaan. kas dapat berupa macam-macam uang kertas atau logam, saldo bank ,deposito, investasi jangka pendek dan sebagainya.*<sup>27</sup>

Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko peubahan nilai yan signifikan.<sup>28</sup>Karena kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likwiditasnya, berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil akan di peroleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang di peroleh akan lebih besar,tetapi suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan (rentabilitas) tanpa memperhatikan likuiditas akhirnya perusahaan itu akan dalam keadaan likuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan

---

<sup>26</sup> PSAK No.2 tahun 1994 Tentang Laporan Arus Kas,hlm.2.2

<sup>27</sup> Douglas Garbutt,*Manajemen Kas*,(Jakarta:Pt.Sapto Dadi,1994),Hlm.11

<sup>28</sup> PSAK No.2,*loc. cit.*

disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun penggunaannya (pengeluarannya).

Dalam hal pengeluaran kas untuk aktivitas penyaluran dana (*financing*) Bank tidak serta merta menyalurkannya dalam bentuk uang tunai yang memungkinkan nasabah bisa mengonsumsi secara langsung, namun lebih kepada upaya produktif.

Produk pembiayaan pada Bank Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad tambahan

Pada kategori pertama dan kedua tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang di jual.<sup>1</sup> Produk yang paling populer dan mendapat proporsi yang lebih besar pada bank syariah secara umum yaitu pembiayaan murabahah. Maka dari itu tingkat pengendaliannya harus lebih besar. Secara teknis mekanisme kerja penyaluran pembiayaan murabahah yang menjadi kerangka pengendalian ialah sebagai berikut: (dilampirkan)

---

<sup>1</sup> Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi ke 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

1. Pendekatan studi penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa studi analisis ini di lakukan di Bank Syariah Mandiri Kuningan karena beberapa pertimbangan :

- a. Lembaga keuangan tersebut sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah.
- b. Bank Syaria'ah Mandiri memiliki peranan penting menumbuhkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang bersifat kemitraan sehingga hubungan *partnership* tercipta dan meningkatkan nilai kredibilitas dari masyarakat.

2. Teknik pengumpulan data

Data di peroleh dari :

- a. Data primer/empirik berupa data yang di peroleh langsung dari lapangan yang berasal dari sumber data yaitu informan untuk memperoleh kelengkapan informasi yang akan di gunakan sebagai bahan penulisan laporan.
- b. Data sekunder/teoritik yakni data yang di peroleh dari sumber bacaan, dokumen yang dapat menginterpretasikan data pada Bank Syariah Mandiri Kuningan.

Adapun cara yang di tempuh untuk menggali informasi secara mendalam dengan cara Interview/wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden staf atau karyawan Bank Syariah Mandiri Kuningan.

### 3. Analisa data

Data yang di peroleh langsung dari responden atau sumber data lainnya akan di kaji untuk mendapatkan hasil studi yang mendalam mengenai struktur pengendalian mengenai organisasi intern yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan murabahah, sistem pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah, dan hubungan Struktur Pengendalian Intern terhadap keamanan pembiayaan murabahah. Analisis ini dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Disply data
3. Verifikasi data,dan
4. Generalisasi

Selanjutnya setelah informasi di pandang cukup lengkap akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu di tambah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu

Bab pertama pendahuluan yang meuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian kerangka pemikiran serta sistematika penulisan

Pada bab kedua berupa kajjian teori dalam tinjauan pustaka yang akan memuat pengertian struktur pengendalian intern, tujuan Struktur Pengendalian Intern,

unsur-unsur struktur pengendalian intern, konsep pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan, macam-macam pembiayaan, prosedur pembiayaan, dan konsep murabahah.

Pada bab ketiga akan memuat kajian tentang kondisi objektif bank syariah mandiri kuningan yang meliputi sejarah singkat dan perkembangannya, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kuningan dan *job description* , produk dan jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri Kuningan

Bab empat berupa analisa terhadap penerapan Struktur Pengendalian Intern pada perusahaan dan peranan Struktur Pengendalian Intern pada perusahaan

Bab lima berisi kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan pengendalian intern yang telah dilaksanakan.